



1. Tujuan 1: Perwujudan kerukunan umat beragama melalui peningkatan kualitas pemahaman agama yang moderat untuk kemaslahatan bersama

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatnya masyarakat yang memiliki cara pandang dan praktik beragama jalan tengah untuk mewujudkan kerukunan dan harmoni sosial	Indeks Kerukunan Umat Beragama	1.	RKMA tentang panduan pemantauan dan evaluasi penguatan moderasi beragama pada K/L	Implementasi pemantauan dan evaluasi penguatan moderasi beragama pada K/L	Badan Moderasi Beragama dan PSDM	Sekjen dan Badan Moderasi Beragama dan PSDM	2025
			2.	Rancangan Revisi KMA Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Moderasi Beragama	Pengembangan bentuk kegiatan penguatan moderasi beragama (Film, Musik dan Kegiatan Kebudayaan	Badan Moderasi Beragama dan PSDM	Sekjen dan Badan Moderasi Beragama dan PSDM	2025





Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian
			3.	RPMA tentang penyelenggaraan KUA EWS (Early Warning System)	Mendeteksi dini potensi konflik sosialkeagamaan, memperkuat peran preventif KUA dalam menjaga stabilitas dan kerukunan masyarakat, serta meningkatkan respons cepat terhadap isu-isu yang dapat memicu konflik.	Bimas Islam, PKUB, Badan Moderasi dan PSDM		2025
			4.	RPMA tentang Penguatan Fungsi FKUB pada dialog, sosialisasi regulasi dan deteksi dini	Optimalisasi dialog lintas agama, sosialisasi regulasi kerukunan, dan deteksi dini konflik, guna memperkuat kerukunan dan pencegahan konflik berbasis kolaborasi di masyarakat.	PKUB, Badan Moderasi dan PSDM		2025





Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	No.	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian
			5.	Percepatan Perpres Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama	Menggantikan Surat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006	Sekretariat Jenderal, PKUB, BMBPSDM		2026

2. Tujuan 2: Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan secara merata, berkualitas, adil dan inklusif

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	No.	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
SS2	Meningkatnya Layanan Keagamaan Transformatif	Indeks Layanan Keagamaan	1.	RPMA tentang Bimbingan Perkawinan Semua Agama	Standardisasi kursus pra nikah untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapan calon pengantin di setiap agama	Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha, Bimas Khongkhucu		2025



Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	No.	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian
			2.	RPMA tentang Standar Kualitas layanan bimbingan keagamaan pada keluarga semua agama	Standardisasi pelaksanaan bimbingan, konseling, mediasi, dan konsultasi perkawinan untuk semua agama untuk meningkatkan ketahanan keluarga	Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha, Bimas Khongkhucu		2025
			3.	RPMA tentang Standar pengelolaan lembaga agama dan ormas keagamaan	Standar pengelolaan yang jelas untuk lembaga agama dan ormas keagamaan guna memastikan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik dan mendukung peran aktif lembaga tersebut dalam pembangunan sosialkeagamaan.	Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha, Bimas Khongkhucu		2025
			4.	RPMA tentang Akreditasi lembaga filantropi keagamaan	Menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan dana keagamaan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam mendukung kegiatan sosial-keagamaan yang berkelanjutan.	Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha, Bimas Khongkhucu		2025





Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	No.	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian
			5.	RPMA tentang Standar Kualitas Layanan Kegamaan bagi semua agama	Standarisasi layanan keagamaan untuk semua agama	Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha, Bimas Khongkhucu		2025

3. Tujuan 3: Peningkatan akses pendidikan bagi peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, dan terjangkau

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	No.	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
SS3	Meningkatnya perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang berkeadilan	Harapan Lama Sekolah	1.	Rancangan PMA tentang penyelenggaraan PAUD	Sebagai landasan hukum penyelenggaraan PAUD	Sekjen, Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Sekjen dan Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	2025



Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian
		APK PAUD/MI/MTs/MA/Sederajat	2.	RPMA tentang pembentukan Madrasah Aliyah Keagamaan dan Kejuruan	Sebagai landasan hukum penyelenggaraan Madrasah Aliyah Keagamaan dan Kejuruan	Sekjen dan Pendis	Sekjen dan Pendis	2025
			3.	RPMA tentang penyelenggaraan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren	Sebagai landasan hukum penyelenggaraan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren	Sekjen dan Pendis	Sekjen dan Pendis	2025
			4.	RPMA tentang Rekognisi pembelajaran masa lampau	Sebagai landasan hukum penyelenggaraan Rekognisi pembelajaran masa lampau	Sekjen, Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Sekjen dan Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	2025
			5.	RPMA tentang Pembentukan Pendidikan Keagamaan dan Pesantren yang diselenggarakan pemerintah	Sebagai pedoman standarisasi Penyelenggaraan pendidikan keagamaan dan pesantren	Sekjen, Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Sekjen dan Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	2025



Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target
SS4	Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah	Nilai kualitas lingkungan belajar PAUD						
		Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional:	6.	RPMA tentang literasi keagamaan 5 bagi Peserta Didik	Untuk memastikan kemampuan peserta didik dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai dasar beragama	Sekjen, Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Sekjen dan Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	2025
		Literasi	7.	RPMA tentang sumber bahan ajar pada pendidikan keagamaan dan pesantren	Panduan bagi pendidikan keagamaan dan pesantren dalam menetapkan sumber ajar yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan	Sekjen, Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Sekjen dan Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	2025
		Numerasi	8.	RPP tentang standar nasional pendidikan pada pendidikan keagamaan dan pesantren	Mempertegas karakteristik pendidikan keagamaan dan pesantren yang berbeda dengan standar pendidikan nasional			2025



Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target
		Persentase satuan pendidikan yang memiliki peserta didik dengan indeks karakter baik	9.	RPMA tentang standar kompetensi lulusan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan dan Kelembagaan pada satuan pendidikan keagamaan dan pesantren	Menjabarkan 4 standar pendidikan keagamaan dan pesantren			2025
SS5	Meningkatnya Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas	Indeks Pemerataan dan Pemenuhan Guru	10.	Rancangan Perpres tentang restrukturisasi guru agama di lingkungan Kementerian Agama	Sebagai pedoman rekrutmen, pembinaan dan distribusi guru agama yang diangkat Kementerian Agama	Sekjen, Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Sekjen dan Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	2025
			11.	Rancangan Perpres tentang Penetapan jenis Profesi keagamaan	Untuk menegaskan jenis-jenis profesi yang relevan dengan fungsi keagamaan (Imam Masjid, Marbot, Guru LPQ)	Sekjen, Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Sekjen dan Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	2025





4. Tujuan 4: Peningkatan mutu dan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	No.	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
SS6	Meningkatnya mutu dan daya saing pendidikan tinggi serta memperluas akses pendidikan tinggi yang berkualitas	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi						
		Persentase lulusan pendidikan tinggi Keagamaan/ Ma'had Aly yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari 1 tahun						
		Jumlah perguruan tinggi yang masuk ke dalam peringkat "THE Impact SDGs: <1000"						

5. Tujuan 5: Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, melayani dan responsif

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
SS7	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	Nilai reformasi birokrasi	1.	Rancangan Revisi Perpres Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama untuk Perubahan nomenklatur organisasi Badan Moderasi Beragama menjadi Badan Kebijakan Pembangunan Agama dan Pengembangan SDM	Perlu adanya Unit Eselon I yang memiliki tugas dan fungsi menyusun rumusan kebijakan dan pengembangan SDM	Badan Moderasi Beragama	Sekretariat Negara, KemenPAN RB, Sekjen dan Badan Moderasi Beragama	2025
			2.	Rancangan Revisi PMA Nomor 25 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama	Pembentukan struktur organisasi sebagai tindak lanjut dari Rancangan Revisi Perpres Nomor 12 Tahun 2023 dan pembentuk BPJPH dan BPH	Badan Moderasi Beragama	KemenPAN RB, Sekjen dan Badan Moderasi Beragama, BPJPH, BPH	2025
			4.	RPMA tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kemenag dengan BPJPH	Terbitnya Perpres No. 152, 153 dan 154 mendorong perubahan tata Kelola di Kementerian Agama	Sekretariat Jenderal	BPJPH	2025



Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian
			5.	RPMA tentang Mekanisme Kerjasama Pemanfaatan Infrastruktur Kemenag oleh BPJPH	Terbitnya Perpres No. 152, 153 dan 154 mendorong perubahan tata Kelola di Kementerian Agama dan kerja sama dengan Badan yang baru terbentuk	Sekretariat Jenderal	BPJPH	2025
			6.	RPMA tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kemenag dengan Badan Penyelenggara Haji	Terbitnya Perpres No. 152, 153 dan 154 mendorong perubahan tata Kelola di Kementerian Agama dan kerja sama dengan Badan yang baru terbentuk	Sekretariat Jenderal, Ditjen PHU	BPH	2025
			7.	RPMA tentang Mekanisme Kerjasama Pemanfaatan Infrastruktur Kemenag oleh Badan Penyelenggara Haji	Terbitnya Perpres No. 152, 153 dan 154 mendorong perubahan tata Kelola di Kementerian Agama dan kerja sama dengan Badan yang baru terbentuk	Sekretariat Jenderal, Ditjen PHU	BPH	2025
			8.	Rancangan Perpres tentang Tugas dan Fungsi Kemenag sebagai regulator dalam pertumbuhan investasi pada industri halal	Upaya mendorong pertumbuhan investasi pada industri halal: Sektor farmasi dan kosmetik halal di Indonesia	Sekretariat Jenderal	BPJPH	2025

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit / Institusi Terkait	Target Penyelesaian
			9.	RPMA tentang pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan keagamaan dan pesantren	Sebagai pedoman rekrutmen pendidikan dan tenaga kependidikan pada pendidikan keagamaan dan pesantren	Sekjen, Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Sekjen dan Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	2025
			10.	RPMA tentang standar Sarana dan Prasarana pada satuan pendidikan	Sebagai standar pengembangan akses pendidikan			2025